



BADAN KEAHLIAN  
DPR RI Evidence-based policy-making

# ANALISIS PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN DALAM NEGERI



**Pengarah:**

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

**Penanggung Jawab:**

Dr. Hj. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn., QGIA., QHIA., QIA.

**Penulis:**

Riza Aditya Syafri, S.Ak., M.E., Satrio Arga Effendi, S.E., M.E.

JUNI 2025

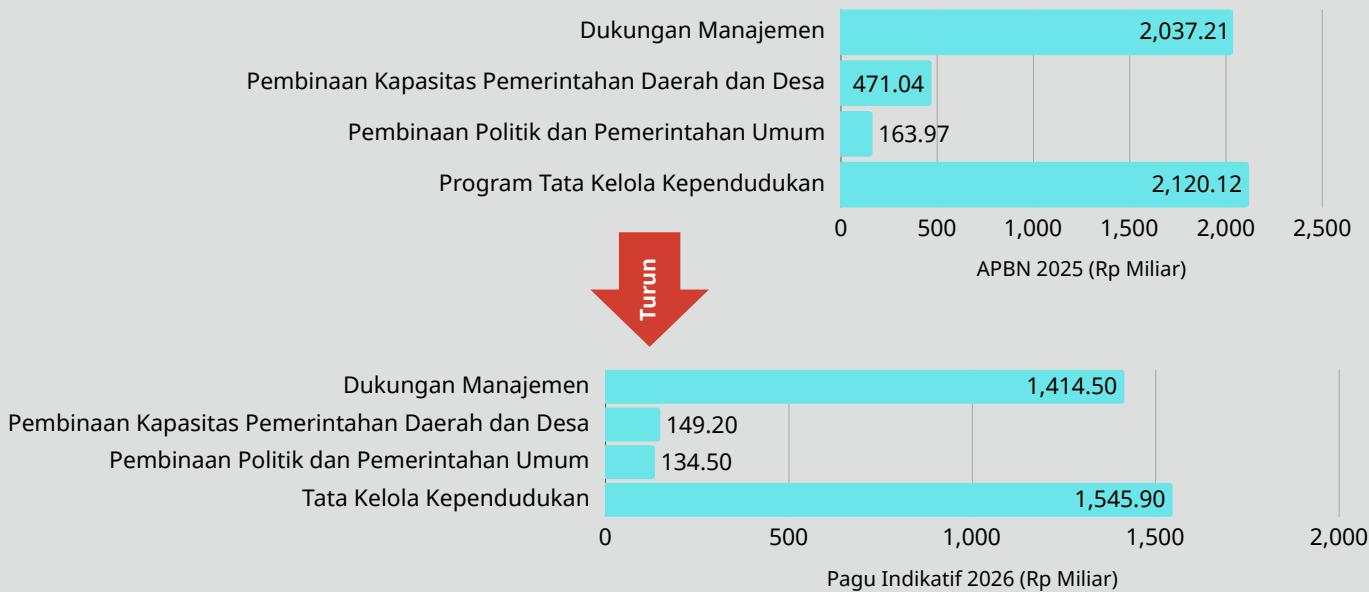
# Daftar Isi

Pagu Indikatif 2026	02
Overview Anggaran 2020-2025	03
Output & Outcome Anggaran 2025	05
Kemendagri dalam PN 01 RPJMN 2025-2029	08
Kemendagri dalam PN 02 RPJMN 2025-2029	10
Kemendagri dalam PN 06 RPJMN 2025-2029	12
Kemendagri dalam PN 07 RPJMN 2025-2029	13
Isu Strategis	15





## Pagu Indikatif 2026



Pagu Indikatif Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2026 sebesar Rp3,24 triliun, dengan dua program utama yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar di tahun 2026, yakni program dukungan manajemen sebesar Rp1,41 triliun, dan program tata kelola kependudukan dengan anggaran sebesar Rp1,54 triliun.

Nilai Pagu Indikatif 2026 tersebut turun sebesar 32,3 persen dibanding Alokasi Anggaran dalam APBN 2025 yang sebesar Rp4,79 triliun sebelum dilakukan efisiensi anggaran berdasarkan Inpres 1 Tahun 2025. Program pembinaan kapasitas pemerintahan daerah dan desa menjadi program dengan penurunan anggaran terbesar di tahun 2026, yakni menurun hingga 68,3 persen dibandingkan alokasi anggaran pada tahun 2025.

# Overview Anggaran 2020-2025

HALAMAN 3



## Alokasi Anggaran Selama Kurun Waktu 2020-2024 Diarahkan Untuk Berbagai Kebijakan Strategis Kemendagri

Selama periode 2020 hingga 2024, Kementerian Dalam Negeri secara konsisten menjalankan kebijakan strategis yang menitikberatkan pada penguatan stabilitas politik dan demokrasi, reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fokus utama diarahkan pada fasilitasi Pemilu dan Pilkada, optimalisasi peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, serta internalisasi nilai-nilai kebangsaan untuk memperkuat kohesi sosial dan ketahanan nasional.

Dalam rangka memperbaiki tata kelola pemerintahan, Kemendagri mendorong reformasi birokrasi melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan nilai indeks Reformasi Birokrasi, serta pengembangan kapasitas aparatur melalui pelatihan, orientasi kepala daerah, dan penyelenggaraan pendidikan kepamongprajaan berbasis corporate university di IPDN. Seiring dengan perkembangan teknologi, digitalisasi pemerintahan menjadi prioritas, termasuk implementasi SIPD sebagai sistem tunggal perencanaan dan keuangan daerah, serta transformasi layanan administrasi kependudukan melalui Identitas Kependudukan Digital dan pencetakan mandiri dokumen.

Kemendagri juga menjalankan kebijakan penataan kewilayahan, termasuk mendukung pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta fasilitasi penyusunan RDTR di kawasan strategis. Di bidang tanggap darurat, kementerian memfasilitasi daerah dalam penerapan SPM kebencanaan, perlindungan perempuan dan anak, serta penguatan kelembagaan pelayanan publik di masa darurat.

Penguatan pengelolaan keuangan daerah dan desa turut menjadi fokus, dengan mendorong transparansi dan akuntabilitas anggaran, sekaligus memperkuat koneksi data antar instansi. Di sisi lain, isu-isu sosial seperti stunting, kemiskinan ekstrem, dan pelayanan dasar ditangani melalui fasilitasi konvergensi program lintas sektor dan penguatan standar pelayanan minimal (SPM) di seluruh daerah.

# Overview Anggaran 2020-2025

HALAMAN 4

→ **Program Dukungan Manajemen Secara Rata-Rata Menjadi Program dengan Alokasi Anggaran Terbesar dengan rata-rata sebesar 48,92 persen**

Alokasi anggaran per program dalam periode 2021-2025 didominasi oleh Program Dukungan Manajemen dengan rata-rata proporsi anggaran sebesar 49,99% terhadap total alokasi anggaran Kemendagri. Sementara itu, Program Tata Kelola Kependudukan dan Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa memiliki proporsi anggaran terbesar kedua dan ketiga selama tahun 2021-2025, dengan rata-rata proporsi anggaran sebesar 28,94% dan 16,91%.

→ **Dilihat dari Anggaran Per Eselon I, Alokasi Anggaran Terbesar Selama Tahun 2020-2024 Terdapat Pada Sekretariat Jenderal, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ditjen Bina Pemerintahan Desa, dan Ditjen Bina Pembangunan Daerah**

Alokasi anggaran per Eselon I selama tahun 2020-2024 didominasi oleh Sekretariat Jenderal, dengan rata-rata proporsi anggaran sebesar 33% dari total anggaran Kemendagri, diikuti oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (23%), Ditjen Bina Pemerintahan Desa (9%), dan Ditjen Bina Pembangunan Daerah (8%).

Dilihat dari tren kenaikan anggarannya selama kurun waktu tahun 2020-2024, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan menjadi unit Eselon I yang mengalami kenaikan anggaran paling signifikan dari tahun 2020 ke tahun 2024, dengan kenaikan anggaran mencapai 156%. Selain itu, Ditjen Bina Keuangan Daerah dan Ditjen Otonomi Daerah juga menjadi unit Eselon I yang mengalami kenaikan anggaran terbesar, dengan masing-masing meningkat sebesar 119% dan 58%.

→ **Porsi belanja barang mendominasi jenis belanja lainnya Pada 2021-2025**

Berdasarkan jenis belanjanya selama periode 2021-2025, secara rata-rata didominasi oleh belanja barang yakni sebesar 68,4%. Di antara ketiga jenis belanja, alokasi belanja modal cenderung menjadi yang terendah, dengan rata-rata sebesar 7,8% per tahun selama tahun 2021-2025.

# Output & Outcome Anggaran 2025

HALAMAN 5

## → Target Keluaran/Output 2025

- Angkatan Pengembangan Kompetensi Manajemen Strategi Penyelenggaraan Pembangunan bagi Aparatur Pemda di Wilayah Perbatasan Antar Negara (Diklat Camat), 180 orang.
- Daerah yang Mengalami Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah, 300 Daerah.
- Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Tipologi Daerah - 546 Daerah.
- Desa yang telah tertib administrasi pengelolaan aset desa - 125 Desa.
- Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik - 17 Rekomendasi Kebijakan.
- Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional - 3.060 Orang.
- Penilaian inovasi terpadu lintas K/L berbasis indeks inovasi daerah - 546 Daerah.
- Provinsi yang disupervisi Kinerjanya dalam penyelenggaraan Otonomi Khusus/ Keistimewaan sesuai Undang-Undang - 10 Daerah .

# Output & Outcome Anggaran 2025

HALAMAN 6

## → Target Keluaran/Output 2025

- Akta Kelahiran yang diterbitkan - 550.000 Akta.
- Daerah yang meningkat kapasitas aparaturnya dalam penilaian kinerja penanganan stunting - 546 Daerah .
- Pelayanan konesitas warehouse berbasis NIK Nasional - 1.300 Lembaga.
- Sistem informasi pembangunan daerah (data pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah, profil dan analisis daerah, e-rakortek, monev bangda) yang dikembangkan - 1 Sistem Informasi.
- Bantuan Keuangan ke Partai Politik - 8 Lembaga/Partai Politik.
- Fasilitasi penguatan demokrasi di daerah - 19 Daerah.
- Kesepakatan Strategis di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan perundingan batas antar negara - 3 Kesepakatan.

# Output & Outcome Anggaran 2025

HALAMAN 7

## → Target Outcome

- Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesengjangan dan Menjamin Pemerataan.
- Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
- Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
- Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

# Kemendagri dalam PN 01 RPJMN 2025–2029

PRIORITAS NASIONAL (PN)	Asta Cita 1 (PN 01) Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
PROGRAM PRIORITAS (PP)	01.04 Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil
SASARAN PROGRAM PRIORITAS	Terwujudnya partisipasi bermakna masyarakat sipil melalui jaminan kesetaraan masyarakat
INDIKATOR SASARAN PROGRAM PRIORITAS	01. Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kesetaraan
KEGIATAN PRIORITAS (KP)	01.04.01 Penyediaan Dana Abadi dan Penguatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS	Terwujudnya penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan peran advokasi, pemberdayaan, dan kontrol sosial
INDIKATOR KEGIATAN PRIORITAS	01. Jumlah daerah dengan Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan berkategori baik

Kemendagri berkewajiban menjalankan PP 01.04 "Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil" dalam mendukung Prioritas Nasional 01, dengan menjalankan KP 01.04.01.

**TARGET INDIKATOR  
SASARAN PROGRAM  
PRIORITAS**

Indeks Demokrasi Indonesia pada aspek kesetaraan pada tahun 2029 di targetkan berkisar antara 83,28-86,81

**TARGET INDIKATOR  
KEGIATAN  
PRIORITAS**

Jumlah daerah dengan Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan berkategori baik di tahun 2029 di targetkan sebanyak 20 daerah

**PROYEK PRIORITAS**

Untuk mencapai target KP 01.04.01, Proyek Prioritas yang akan dijalankan yakni: (a) Penyusunan Regulasi Dana Abadi Organisasi Kemasyarakatan; dan (b) Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan, dan Lingkungan Pendukung Masyarakat Sipil

# Kemendagri dalam PN 02 RPJMN 2025–2029

PRIORITAS NASIONAL (PN)	<b>Asta Cita 2 (PN 02)</b> <b>Memantapkan Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara serta Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru</b>	
PROGRAM PRIORITAS (PP)	02.04 Intelijen dan Keamanan Dalam Negeri	02.12 Swasembada Air
SASARAN PROGRAM PRIORITAS	Terwujudnya sistem deteksi dini yang mampu mendukung keamanan negara	Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif
KEGIATAN PRIORITAS (KP)	02.04.01 Melakukan Sinergi Pendekatan Sejarah, Budaya, Kearifan Lokal, dan Sosial Ekonomi, serta Paham Kebhinnekaan di Daerah-Daerah yang Rawan Konflik serta Rentan Isu Separatisme	02.12.07 Penguatan Tata Kelola Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Berorientasi pada Keberlanjutan
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS	Terwujudnya sinergi pendekatan sejarah, budaya, kearifan lokal, dan sosial ekonomi, serta paham kebhinekaan di daerah-daerah yang rawan konflik serta rentan isu separatisme	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan air minum dan sanitasi (air limbah domestik) yang aman dan berkelanjutan
INDIKATOR KEGIATAN PRIORITAS	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam aspek wawasan kebangsaan pada wilayah konflik dan rentan	01. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki kelembagaan air limbah domestik (UPTD/BLUD/BUMD)  02. BUMD Air Minum dengan tarif Full Cost Recovery  03. Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan tarif/retribusi layanan air limbah domestik

Kemendagri berkewajiban menjalankan KP 02.04.01 "Sinergi Pendekatan Sejarah, Budaya, Kearifan Lokal, dan Sosial Ekonomi, serta Paham Kebhinnekaan di Daerah-Daerah yang Rawan Konflik serta Rentan Isu Separatisme" dan KP 02.12.07 "Penguatan Tata Kelola Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Berorientasi pada Keberlanjutan" guna mendukung pencapaian PP 02.04 "Intelijen dan Keamanan Dalam Negeri" dengan indikator Fragile State Index Indonesia pada tahun 2029 di targetkan pada angka 59,2, dari baseline tahun 2024 sebesar 63,7. Sementara itu target PP 02.12 "Swasembada Air" dengan indikator Rasio kapasitas air baku terpasang terhadap kebutuhan penduduk sebesar 56,16 persen pada tahun 2029.

**TARGET INDIKATOR  
KEGIATAN  
PRIORITAS**

**Target Indikator KP 02.04.01**

Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam aspek wawasan kebangsaan pada wilayah konflik dan rentan sebanyak 5 kegiatan pada tahun 2029

**Target Indikator KP 02.12.07**

- Jumlah kabupaten/kota yang memiliki kelembagaan air limbah domestik (UPTD/BLUD/BUMD) sebanyak 514 kab/kota di tahun 2029;
- BUMD Air Minum dengan tarif Full Cost Recovery sebanyak 100 persen di tahun 2029;
- Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan tarif/retribusi layanan air limbah domestik sebanyak 100 kab/kota di tahun 2019

**PROYEK PRIORITAS**

Untuk mencapai target KP 02.04.01 ini, Proyek Prioritas yang akan dijalankan yakni pemberdayaan masyarakat dalam aspek wawasan kebangsaan pada wilayah konflik dan rentan

Untuk mencapai target KP 02.12.07 ini, Proyek Prioritas yang akan dijalankan yakni: (a) Penyusunan dan sinkronisasi Perencanaan Air Minum dan Sanitasi melalui P3AM dan PPSP; (b) Penguatan Kelembagaan dan Pengaturan Air Baku, Air Minum, dan Sanitasi; (c) Reformasi Kebijakan Tarif Air Baku, Air Minum, dan Air Limbah Domestik; dan (d) Penyusunan dan Pendampingan Pengaturan dan NSPK Air Minum dan Sanitasi

# Kemendagri dalam PN 06 RPJMN 2025-2029

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)</b>	Asta Cita 6 (PN 06) Membangun dari Desa dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
<b>PROGRAM PRIORITAS (PP)</b>	06.07 Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelaanjutan
<b>SASARAN PROGRAM PRIORITAS</b>	Mewujudkan Pembangunan Kemandirian Perdesaan Sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelaanjutan
<b>KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	06.07.03 Penguatan Tata Kelola dan Pemberdayaan Desa Adaptif
<b>SASARAN KEGIATAN PRIORITAS</b>	Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah dan Pemberdayaan Pembangunan Desa secara Adaptif
<b>INDIKATOR KEGIATAN PRIORITAS</b>	02. Jumlah desa yang menginisiasi kerja sama desa 03. Jumlah desa yang menerapkan administrasi dan pengelolaan keuangan desa berbasis digital

Kemendagri berkewajiban menjalankan KP 06.07.03 "Penguatan Tata Kelola dan Pemberdayaan Desa Adaptif" guna mendukung pencapaian PP 06.07 "Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelaanjutan".

<b>TARGET INDIKATOR KEGIATAN PRIORITAS</b>	02. Jumlah desa yang menginisiasi kerja sama desa sebanyak 800 desa pada tahun 2029; 03. Jumlah desa yang menerapkan administrasi dan pengelolaan keuangan desa berbasis digital 1.660 desa pada tahun 2029
<b>PROYEK PRIORITAS</b>	Untuk mencapai target KP 06.07.03 ini, Proyek Prioritas yang akan dijalankan yakni: (a) Penguatan pengelolaan keuangan desa; (b) Penguatan Kelembagaan Desa; (c) Penguatan Tata Kelola Data Desa

# Kemendagri dalam PN 07 RPJMN 2025–2029

<b>PRIORITAS NASIONAL (PN)</b>	<b>Asta Cita 7 (PN 07)</b> <b>Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyalundupan</b>	
<b>PROGRAM PRIORITAS (PP)</b>	07.01 Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu	07.09 Penataan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
<b>SASARAN PROGRAM PRIORITAS</b>	Terwujudnya penguatan jaminan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan pemilu dan pelayanan publik yang didukung data kependudukan yang akurat	Terwujudnya harmonisasi pembagian kewenangan antara tingkat pemerintahan dengan memperhatikan tipologi kewilayahan serta penguatan fondasi keuangan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah daerah
<b>INDIKATOR SASARAN PROGRAM PRIORITAS</b>	Jumlah daerah dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berkategori "Sangat Baik"	01. Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat 02. Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 03. Rasio Penerimaan Pajak Daerah terhadap PDRB (local tax ratio)
<b>KEGIATAN PRIORITAS (KP)</b>	07.01.02 Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi Penduduk Wajib KTP	07.09.01 Harmonisasi Hubungan Pusat dan Daerah
<b>SASARAN KEGIATAN PRIORITAS</b>	Terselenggaranya pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP	Terwujudnya harmonisasi kewenangan pusat dan daerah yang optimal
<b>INDIKATOR KEGIATAN PRIORITAS</b>	Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP	Provinsi dengan Indeks Kinerja Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berkategori sangat baik
Kemendagri berkewajiban menjalankan KP 07.01.02 "Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi Penduduk Wajib KTP" dan KP 07.09.01 "Harmonisasi Hubungan Pusat dan Daerah" guna mewujudkan pencapaian PP 07.01 dan PP 07.09 dalam menopang PN 07.		

**TARGET INDIKATOR  
PROGRAM  
PRIORITAS****TARGET INDIKATOR  
KEGIATAN  
PRIORITAS****PROYEK PRIORITAS****Target Indikator PP 07.01**

Jumlah daerah dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berkategori "Sangat Baik" pada tahun 2029 sebanyak 514 daerah

**Target Indikator KP 07.01.02**

Percentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP pada tahun 2029 sebanyak 50 persen

Untuk mencapai target KP 07.01.02 ini, Proyek Prioritas yang akan dijalankan yakni: (a) Pemanfaatan data kependudukan nasional; (b) Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan

**Target Indikator PP 07.09**

- Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada tahun 2029 sebesar 85
- Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada tahun 2029 sebesar 92
- Rasio Penerimaan Pajak Daerah terhadap PDRB (local tax ratio) pada tahun 2029 sebesar 1,45 persen terhadap PDB

**Target Indikator KP 07.09.01**

Provinsi dengan Indeks Kinerja Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berkategori sangat baik sebanyak 30 Provinsi pada tahun 2029

Untuk mencapai target KP 07.09.01 ini, Proyek Prioritas yang akan dijalankan yakni: (a) Penyiapan Revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah; (b) Penguatan Kolaborasi Multi Aktor di Daerah; (c) Optimalisasi Sinergi Pemerintahan Pusat dan Daerah

# Isu Strategis

**Belum Optimalnya Implementasi SIPD sebagai Platform Tunggal Pemerintahan Daerah**

Meski SIPD telah diamanatkan sebagai sistem tunggal perencanaan dan penganggaran daerah, hingga 2024 masih banyak daerah yang belum optimal dalam pemanfaatannya. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan kapasitas SDM, kurangnya pemahaman proses bisnis digitalisasi, dan belum terintegrasinya SIPD dengan sistem informasi lain. Hal ini berimplikasi pada rendahnya akuntabilitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan daerah.

**Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Belum Merata**

Meskipun berbagai inovasi seperti Identitas Kependudukan Digital dan D-Sign telah diluncurkan, masih terdapat kesenjangan akses dan kualitas pelayanan adminduk di daerah, terutama di kawasan 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Keterbatasan infrastruktur digital dan kapasitas SDM menyebabkan masyarakat di daerah belum sepenuhnya dapat menikmati layanan yang cepat, mudah, dan gratis sebagaimana ditargetkan.

**Rendahnya Kinerja Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Evaluasi kinerja daerah menunjukkan banyak daerah belum mencapai target implementasi 6 urusan wajib pelayanan dasar, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, dan sosial. Permasalahan umum meliputi keterbatasan anggaran, lemahnya kapasitas teknis daerah, dan belum sinkronnya RPJMD dengan dokumen SPM. Hal ini menghambat upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata.

**Masih Lemahnya Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Pusat-Daerah**

Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, terutama dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD dan Renstra), masih belum optimal. Permasalahan ini diperparah dengan lemahnya mekanisme asistensi dan pengawasan Kemendagri terhadap penyusunan dokumen daerah, sehingga berdampak pada ketidaksesuaian prioritas pembangunan dan rendahnya efektivitas transfer fiskal pusat.

# Isu Strategis

**Minimnya Inovasi  
dan Daya Saing  
Pemerintahan  
Daerah**

Masih banyak daerah yang belum menunjukkan kemajuan signifikan dalam hal inovasi tata kelola maupun pelayanan publik. Kendala utamanya terletak pada budaya birokrasi yang belum adaptif, keterbatasan SDM, dan rendahnya pemanfaatan teknologi. Padahal, peningkatan inovasi daerah menjadi kunci dalam menjawab tantangan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

**Rendahnya  
Efektivitas Peran  
Gubernur sebagai  
Wakil Pemerintah  
Pusat (GWPP)**

Pelaksanaan fungsi gubernur sebagai Gubernur Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) masih menghadapi tantangan dalam aspek koordinasi lintas sektor, lemahnya respon pemda, serta terbatasnya perangkat pendukung pelaksanaan tugas dekonsentrasi. Hal ini menyebabkan beberapa kebijakan strategis pemerintah pusat, seperti pengendalian inflasi daerah dan penurunan stunting, tidak terimplementasi optimal di tingkat provinsi/kabupaten/kota.



# Follow Kami



[www.bkd.dpr.go.id](http://www.bkd.dpr.go.id)



[pa3kn.bkdprri](https://www.instagram.com/pa3kn.bkdprri)